

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA KANTOR WALI
NAGARI SIJUNJUNG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli
Madya(A.Md) Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RAFIDHA DELLIANA PUTRI

21133065

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI SIJUNJUNG**

NAMA : RAFIDHA DELLIANA PUTRI
NIM/ TM : 21133065 / 2021
DEPARTEMEN : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

Padang, November 2024

Disetujui Oleh:

**Mengetahui,
Koordinator Diploma III Akuntansi**



Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc
NIP. 198401132009122005

Pembimbing



Dian Fitria Handayani, S.E., M.Sc
NIDN: 0010019103

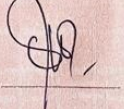
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI SIJUNJUNG**

NAMA : RAFIDHA DELLIANA PUTRI
NIM/TM : 21133065/ 2021
DEPARTEMEN : AKUNTANSI
PRODI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji
Tugas Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi
Fakultas Ekomomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 11 November 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dian fitria Handayani, SE.,M.Sc	(Pembimbing)	
Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	(Penguji 1)	
Dewi Pebriyanti , SE, M.Si	(Penguji 2)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafidha Delliana Putri
NIM/TM :21133065/2021
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Uban/08 Januari 2001
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat :Jl. Diponegoro jorong tapian diaro sijunjung,
kec.sijunjungkab. Sijunjung,Provinsi,Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan
DanBelanjaDesaPada Kantor Wali Nagari Sijunjung.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 11 November 2024
Yang menyatakan,

Rafidha Delliana Putri
NIM. 21133065

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Kantor Wali Nagari Sijunjung”. dengan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya Departemen Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga menyadari bahwa sangat tidak mudah bagi penulis dalam menyelesaikannya tanpa adanya bantuan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang dimulai dari tahap awal penentuan judul hingga sampai tahap akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, yaitu :

1. Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan nikmat jasmani dan rohani serta memberikan kesempatan hidup.
2. Cinta Pertamakuyaitu, ayahanda Muklis, Beliaulah salah satu yang memotivasi, memberi semangat dan mendukung secara lahir dan batin atas semua proses kegiatan yang telah penulis lakukan dalam Menyelesaikan Tugas Akhir ini
3. Pintu surgaku yaitu Ibunda Dewi anggraini Beliau sangat berperan penting dalam Menyelesaikan study penulis, Beliau juga memberi semangat motivasi serta doa yang beliau berikan kepada penulis sehingga penulis mampu Menyelesaikan Tugas akhir.
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E.,M.Sc.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan dan Staf Tata Usaha, yang telah membantu dalam pembuatan surat penelitian dan lainnya.
5. Bapak Dr. Marwan, S. Pd, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang .
6. Ibu Mayar Afriyenti S.E,MM selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang .
5. Bapak Halkadri Fitra, S.E., M.M, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama masa studi penulis berlangsung.

6. Ibu Dian Fitria Handayani S.E,M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan saat melaksanakan Tugas Akhir.
7. Dan kepada adik penulis yaitu Anisa Dwiyana beliau juga ikut memberikan semangat kepada penulis untuk dapat Menyelesaikan Tugas akhir sampai selesai.
8. Dan untuk keponakan penulis yaitu Arshaka Atallah Hanan yang sudah menemani penulis untuk Menyelesaikan Tugas akhir walaupun beliau belum mengerti apa-apa.dengan tingkah lucunya membuat penulis semangat mengerjakan Tugas Akhir ini hingga selesai.
9. Dan terakhir kepada diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh tantangan,semangat dan berenergi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala keterbatasan penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua terutama di Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Atas Perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 11 November 2024

Rafidha Delliana Putri
NIM. 21133065

Abstrak:

Judul Tugas Akhir : Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Wali Nagari Sijunjung.

Pembimbing :Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kantor Wali Nagari Sijunjung. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDes dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa untuk menetapkan prioritas pembangunan. Sumber pendapatan desa meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta pajak dan retribusi lokal.

Penggunaan anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya transparansi dalam proses penyusunan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi perangkat desa dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan APBDes untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelolaan keuangan desa dan menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

Kata kunci: Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBDes

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. PROSES PENYUSUNAN APBDes.....	Error! Bookmark not defined.
B. ANGGARAN	14
1 . Pengertian Anggaran.....	14
C. PENDAPATAN DESA	19
PENDEKATAN PENELITIAN	26
A. Bentuk Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Tahapan Penelitian.....	27
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
B. Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Sijunjung	32
C. Hasil dan Pembahasan.....	33
1. Hasil Analisis.....	33
o Gaji aparatur desa, biaya operasional, dan administrasi	Error! Bookmark not defined.
2. Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	37
KESIMPULAN DAN SARAN	37
1. Kesimpulan	37
2. Saran	37

Daftar Pustaka	39
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I . Peta wilayah nagari sijunjung	30
Gambar II. Struktur Organisasi nagari sijunjung	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan bagian krusial dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom telah memberikan peluang untuk memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penyusunan anggaran. Kantor wali nagari sijunjung, sebagai perwakilan pemerintahan desa, memiliki tanggung jawab untuk menyusun APBDes yang transparan dan akuntabel.

Hal ini didukung dari pendapat menurut Herlianto(2017),transparan dalam penyusunan APBDes sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat desa hingga masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan lokal sangat penting agar anggaran yang disusun mencerminkan prioritas dan kepentingan warga. Namun, penyusunan APBDes tidak lepas dari tantangan.(Mardiasmo,2018:213).

Pentingnya evaluasi dalam proses penyusunan APBDes.anggaran disusun dan dilaksanakan,perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran.(Suharto,2021:36).

berdasarkan dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan Proses penyusunan APBDes melibatkan berbagai aspek mulai dari partisipasi masyarakat, perencanaan yang sistematis hingga transparan dan akuntabilitas. Evaluasi dan penggunaan teknologi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyusunan anggaran desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses penyusunan APBDes di Kantor Wali Nagari Sijunjung, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan memahami proses ini, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat tercapai pembangunan yang merata dan berkeadilan di tingkat desa.

Permasalahan keuangan pada kantor Wali Nagari Sijunjung, Sumatera Barat, mencerminkan sejumlah tantangan yang kerap dihadapi oleh lembaga pemerintahan desa dalam mengelola dana publik. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Transparansi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana, namun di beberapa kasus, laporan keuangan yang disusun oleh pihak nagari tidak dipublikasikan secara terbuka atau hanya terbatas pada lingkup internal. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan di

kalangan masyarakat karena mereka tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait alokasi dan penggunaan anggaran desa.

Selain masalah transparansi, minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kantor Wali Nagari juga menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Banyak aparatur nagari yang kurang memahami aturan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara, terutama yang berhubungan dengan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis menyebabkan kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti kesalahan pencatatan, atau tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Rendahnya akuntabilitas dalam penggunaan dana nagari. Terkadang, program-program yang dibiayai oleh dana desa tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, atau bahkan tidak terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya perencanaan dan pengawasan. Sebagai contoh, proyek infrastruktur yang seharusnya dibangun dengan dana nagari sering kali mengalami keterlambatan atau kualitas pekerjaan yang buruk akibat ketidakjelasan pengelolaan dana.

Pendapatan asli nagari (PAN) yang rendah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan. Banyak nagari yang masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketergantungan ini menyebabkan kurangnya kemandirian dalam pengelolaan anggaran, di mana nagari tidak mampu mengembangkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan tambahan. Akibatnya, program-program pembangunan nagari sering kali terhambat oleh

keterbatasan dana. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan nagari juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Idealnya, masyarakat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa melalui forum-forum seperti Musyawarah Nagari. Hal ini membuka celah bagi oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan anggaran tanpa pengawasan yang memadai.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala utama dalam penyusunan APBDes di Wali Nagari Sijunjung. Banyak aparatur yang tidak memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi, sehingga menyulitkan mereka dalam menyusun anggaran secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan desa. Minimnya pelatihan terkait tata kelola keuangan desa menambah beban bagi staf-staf desa dalam mengelola anggaran secara akurat. Kekurangan ini sering kali menyebabkan kesalahan pencatatan atau pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses penyusunan APBDes juga menjadi salah satu masalah penting. Dalam musyawarah nagari, idealnya masyarakat diundang untuk turut serta menentukan prioritas pembangunan desa. Namun, pada kenyataannya, keterlibatan masyarakat sering kali minim. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan anggaran dan kurangnya sosialisasi dari pihak nagari. Akibatnya, keputusan anggaran sering diambil oleh segelintir pihak tanpa masukan yang memadai dari masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung Nomor 3 tahun 2023 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sijunjung mengatur mekanisme dan prosedur dalam penyusunan APBDes. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Masalah lain yang sering muncul adalah ketidakjelasan dalam menentukan prioritas pengeluaran anggaran. Banyak nagari yang masih belum mampu membedakan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dalam program pembangunan. Alokasi anggaran sering kali didominasi oleh proyek-proyek fisik, seperti pembangunan infrastruktur, tanpa memperhatikan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat non-fisik, seperti pelatihan atau peningkatan kualitas SDM. Hal ini membuat keseimbangan pembangunan tidak tercapai dan menghambat pertumbuhan sosial-ekonomi desa. Selain itu, koordinasi yang buruk antara pemerintah nagari dengan pemerintah kabupaten atau pihak terkait lainnya menjadi hambatan serius dalam penyusunan APBDes. Ketidaktepahaman dalam interpretasi aturan penggunaan dana desa atau ketidakselarasan program pembangunan antara tingkat desa dan kabupaten sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam penyusunan anggaran. Nagari kesulitan menyusun anggaran yang sinkron dengan program yang didukung oleh pemerintah daerah, sehingga berpotensi menyebabkan tumpang tindih proyek atau pemborosan anggaran.

Ketidakcocokan antara kebutuhan lapangan dan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDes juga menjadi isu. Kadang, anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, beberapa proyek pembangunan

mungkin tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau malah tidak sesuai dengan kondisi fisik wilayah nagari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya survei lapangan atau kajian teknis yang dilakukan sebelum penyusunan anggaran, sehingga dana yang dialokasikan menjadi tidak efektif. Banyaknya tahapan dan dokumen yang harus disiapkan, seperti RKPDDes, Musrenbang Desa, hingga pengesahan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebabkan waktu penyusunan anggaran menjadi molor. Keterlambatan ini berdampak pada realisasi program pembangunan yang seharusnya sudah berjalan di awal tahun anggaran. Akibatnya, banyak program yang harus dikejar di akhir tahun, yang berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan.

Masalah transparansi juga sering mencuat dalam penyusunan APBDes di Wali Nagari Sijunjung. Meskipun peraturan sudah mewajibkan agar seluruh proses penyusunan anggaran terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam praktiknya, informasi tentang anggaran sering kali tidak dipublikasikan secara memadai. Minimnya transparansi ini menyebabkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa anggaran desa tidak dikelola dengan baik, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah nagari. Selain itu, beberapa gagasan atau ide dari kewenangan dalam pengelolaan dana sering terjadi antara perangkat nagari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas, kadang-kadang terlibat dalam keputusan-keputusan anggaran yang seharusnya menjadi domain eksekutif nagari. Ketidaktegasan batas kewenangan ini menciptakan konflik internal yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses penyusunan anggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengulasnyadan memberikan judul penulisan ini dengan:“**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI SIJUNJUNG**”

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyusunan APBDes di kantor wali nagari sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes di kantor wali nagari sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai sarana untuk pengembangan konsep teori yang telah didapatkan selama bangku perkuliahan, agar dapat diterapkan pada permasalahan dalam.
 - b. Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. kehidupan nyata yang dimana berkaitan dengan masalah proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes di kantor wali nagari sijunjung
2. Bagi Instansi

- a. Sebagai tambahan bahan referensi dalam proses penyusunan anggaran pendapatan desa
- b. Sebagai tambahan bahan referensi dalam proses penyusunan anggaran belanja desa.

3. Bagi pembaca

- a. Diharapkan menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian maupun studi lebih lanjut.
- b. Sebagai bahan rujukan dalam melihat dan menganalisis proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada pemerintahan Nagari Sijunjung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses penyusunan APBDes di Nagari Sijunjung telah mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pelaksanaan dan pengawasan.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDes cukup baik, terutama dalam tahap perencanaan melalui musyawarah desa. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan partisipasi pada tahap-tahap selanjutnya.
- 3) Transparansi dalam proses penyusunan APBDes sudah cukup baik, dengan adanya penyampaian informasi melalui papan pengumuman dan media sosial. Meski demikian, aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- 4) Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes telah dilaksanakan melalui pelaporan berkala dan pertanggungjawaban akhir tahun. Namun, pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan masih terbatas.
- 5) Terdapat beberapa kendala dalam proses penyusunan APBDes, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis penganggaran, serta koordinasi antar lembaga yang terkadang belum optimal.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan APBDes di Nagari Sijunjung:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparaturnagari melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait penyusunan anggaran, administrasi keuangan, dan pelaporan.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan APBDes, termasuk pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi.
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses penyusunan APBDes, serta mekanisme penyampaian aspirasi.
- 4) Memperkuat transparansi dengan menyediakan informasi APBDes yang lebih detail dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk penggunaan infografis dan media visual lainnya.
- 5) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses penyusunan APBDes.
- 6) Melakukan evaluasi berkala terhadap proses penyusunan APBDes dan mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan.
- 7) Mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan nagari, termasuk pengembangan sumber-sumber pendapatan asli nagari yang potensial.
- 8) Meningkatkan pengawasan dan monitoring pelaksanaan APBDes dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan proses penyusunan APBDes di Nagari Sijunjung dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat nagari secara optimal.

Daftar Pustaka

Herlianto(2017),transparan dalam penyusunan APBDes sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hafiz, M. R. (2020). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia: Studi Kasus Desa Sijunjung*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 45-59.

Mardiasmo, (2018:213) Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan lokal sangat penting agar anggaran yang disusun mencerminkan prioritas dan kepentingan warga. Namun, penyusunan APBDes tidak lepas dari tantangan.

Suharto(,2021:36).Pentingnya evaluasi dalam proses penyusunan APBDes.anggaran disusun dan dilaksanakan,perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung Nomor 3 tahun 2023 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sijunjung mengatur mekanisme dan prosedur dalam penyusunan APBDes.

Rizal, I. dan Amalia, S. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Desa: Studi di Nagari Sijunjung*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 7(2), 75-90.

Prasetyo, H. (2021). *Pengaruh Musyawarah Desa terhadap Penyusunan APBDes di Kabupaten Sijunjung*. Jurnal Pembangunan Desa, 10(1), 55-67.

Widodo, A. dan Sari, N. (2023). *Inovasi dalam Penyusunan APBDes: Tantangan dan Peluang di Nagari Sijunjung*. Jurnal Manajemen dan Administrasi, 12(4), 204-215.